



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



**BETTER w/ DJPK
SERASI EPISODE 13:**

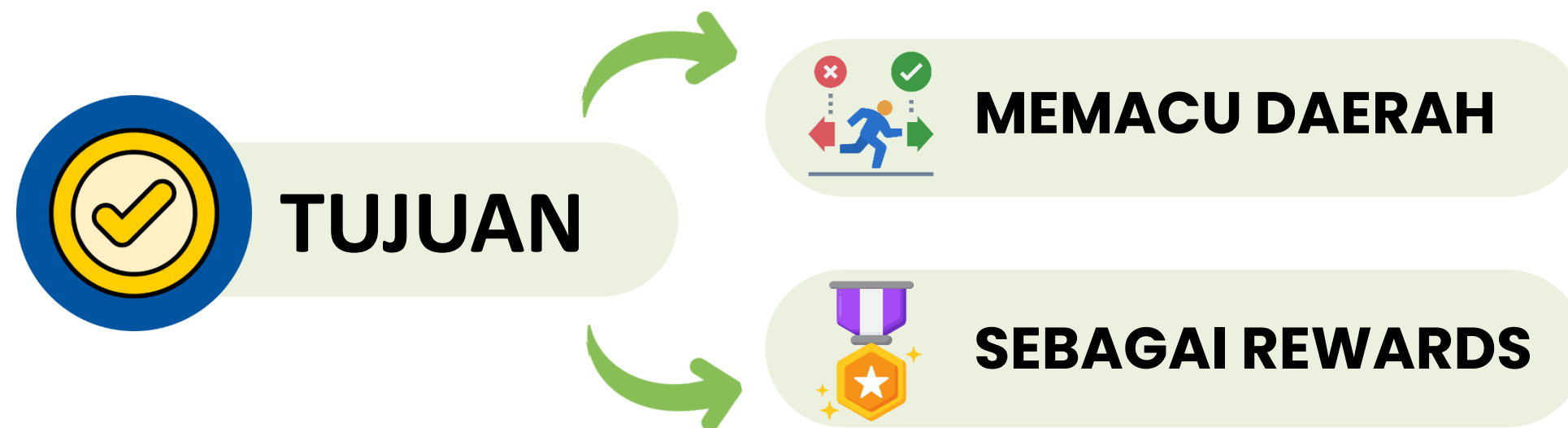
Bincang Insentif Fiskal Tahun Berjalan bersama Direktur DDIOKK

SELASA, 3 SEPTEMBER 2024

UU NO 1 TAHUN 2022

tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah selain memberikan TKD, Pemerintah dapat memberikan Insentif Fiskal kepada daerah atas pencapaian kinerja tertentu:

- Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Pelayanan Umum Pemerintahan; dan
- Pelayanan Dasar.



Prinsip Insentif Fiskal

- ✓ **Keadilan (fairness)**, setiap daerah memiliki kesempatan yang sama
- ✓ **Dapat diperbandingkan**, menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator yang sama untuk setiap daerah;
- ✓ **Objektif**, menggunakan sistem pengukuran kinerja yang tidak multitafsir;
- ✓ **Terukur**, dilaksanakan dengan menggunakan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang dikuantitatifkan sehingga dapat dihitung secara kuantitatif;
- ✓ **Akuntabel**, data dari lembaga statistik pemerintah dan/atau kementerian/lembaga teknis yang berwenang;
- ✓ **Relevan**, kinerja yang dinilai yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara umum.

Kebijakan Insentif Fiskal TA 2024



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



INSENTIF FISKAL

RP8 TRILIUN

(UU 19/2024 ttg APBN TA 2024)

INSENTIF FISKAL KINERJA
TAHUN SEBELUMNYA (KTS)

Rp4 T

Ketentuan
Tata Kelola
diatur dalam
PMK 125/2023

*Rincian per daerah ditetapkan dalam
Perpres 76 tahun 2023*

**Diberikan kepada: 8 Prov,
24 Kota, dan 102 Kab per
kategori**

INSENTIF FISKAL KINERJA
TAHUN BERJALAN (KTB)

Rp4 T

Ketentuan
Tata Kelola
diatur dalam
PMK 43/2024

Rp0,9 T

KATEGORI PENGENDALIAN INFLASI
Periode I, Periode II, dan Periode 3

Rp3,1 T

KELOMPOK KATEGORI PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

- (1) Penurunan Stunting,
- (2) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,
- (3) Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan
- (4) Percepatan Belanja Daerah
(Periode Data Januari-Juni)

- Menggunakan Data 2 – 3 Tahun Terakhir;
- Indikator menunjukkan capaian output Pemda;
- Dipengaruhi faktor di luar Pemda;
- Kriteria Penilaian relatif konsisten tiap tahun.

- Menggunakan Data Triwulan atau Semesteran pada Tahun Berjalan;
- Indikator mencerminkan kinerja Pemda;
- Lebih mencerminkan indikator proses;
- Kriteria Penilaian sesuai dengan prioritas strategis Pemerintah.

Indikator IF Kinerja Tahun Sebelumnya TA 2024

Kategori Kinerja		Nilai Kinerja	Peringkat	Alokasi (miliar Rp)
A	Pengelolaan Keuangan Daerah	4,86	8	7,78
	1. Kemandirian Daerah	1,78		
	2. Interkoneksi SIKD	1,64		
	3. SAKIP	1,44		
B	Pelayanan Dasar	8,97	160	
	1. Imunisasi Lengkap	1,31		
	2. SPM Pendidikan	1,33		
	3. Cakupan Sanitasi	1,73		
	4. Pengelolaan Air Minum	1,64		
	5. Penurunan Pengangguran	1,53		
	6. Peningkatan IPM	1,43		
C	Dukungan Fokus Kebijakan Nasional	3,07	99	
	1. Penurunan Stunting	1,57		
	2. Penurunan Kemiskinan	1,50		
	3. Pengendalian Inflasi			
D	Sinergi Kebijakan Pemerintah	3,07	51	
	- Pelayanan	1,59		
	1. PTSP & PPB			
	2. Penghargaan Pembangunan Daerah			
	3. Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah	1,59		
	- Inovasi			
	1. Inovasi Daerah			
	2. Inovasi Pelayanan Daerah			
	3. Pengelolaan Lingkungan Hidup			
	- Integritas	1,29		
	1. Tingkat Persepsi Korupsi	1,29		
Total Alokasi IF 2024				7,78

- Indikator yang digunakan dalam penilaian IF kinerja tahun sebelumnya meliputi:
 - a) Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b) Pelayanan Dasar;
 - c) Dukungan Fokus Kebijakan Nasional; dan
 - d) Sinergi Kebijakan Pemerintah
- Alokasi diberikan kepada diberikan kepada daerah yang memiliki peringkat terbaik yakni 8 untuk Prov, 24 untuk Kota, dan 102 untuk Kab per kategori.
- Dari rapor kinerja disamping menunjukkan suatu daerah Kabupaten memperoleh alokasi dari kategori Pengelolaan Keuangan Daerah dengan **peringkat 8** (masuk dalam 37 Kabupaten Terbaik) sebesar **Rp7,78 miliar**.

Indikator IF Kinerja Tahun Berjalan TA 2024

Indikator Penilaian Kinerja Inflasi



Peringkat
Inflasi



Peringkat daerah berdasarkan Indeks Perkembangan Harga untuk kab/kota dan Inflasi gabungan untuk provinsi

Bobot: Prov = 6 , Kab/Kota = 10

**Kemendag
BPS**



Dukungan Belanja
Penanganan
Inflasi



Realisasi belanja penandaan inflasi dibanding total belanja APBD

Bobot: Prov = 47 , Kab/Kota = 30

Kemenkeu



Laporan
Pengendalian
Inflasi



Kepatuhan penyampaian laporan harian pengendalian inflasi

Bobot: Prov = 47 , Kab/Kota = 30

Kemendagri

Khusus
Kab/Kota



Upaya
Pengendalian
Inflasi



Pelaksanaan 9 upaya pengendalian inflasi versi Kemendagri

Bobot: Kab/Kota = 30

Kemendagri

INDIKATOR IF KTB TA 2024 – KELOMPOK KATEGORI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT – KATEGORI PENANGANAN STUNTING

INDIKATOR PENILAIAN	PROVINSI	KAB/KOTA	Bobot
Input			15
1) Pelaporan hasil penilaian kinerja konvergensi kabupaten/kota	√		
2) Integrasi target prevalensi penurunan Stunting dlm Rencana Kerja Pemerintah Daerah		√	
Proses			45
1) Pelaksanaan Rembuk Stunting	√		
2) penyampaian pelaporan belanja penandaan stunting	√		
3) Kendali Capaian AKSI Konvergensi	√		
4) Capaian pelaksanaan aksi konvergensi tahun 2024		√	
5) Capaian imunisasi dasar lengkap pada bayi		√	
6) % sasaran Catin/Calon PUS yang registrasi melalui aplikasi elsimil	√	√	
7) realisasi tertimbang belanja penandaan stunting	√	√	
Output			40
1) Balita yang dipantau pertumbuhannya (D/S)	√	√	
2) Ibu hamil mendapat pemeriksaan kehamilan 6 kali	√	√	
3) % keluarga berisiko stunting yang mendapatkan pendampingan	√	√	
Total			100

☐ Data berasal dari Kemendagri, BKKBN, Kemenkes, dan Kemenkeu

☐ Data Januari sd Juni Tahun 2024

INDIKATOR IF KTB TA 2024 – KELOMPOK KATEGORI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT – KATEGORI PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



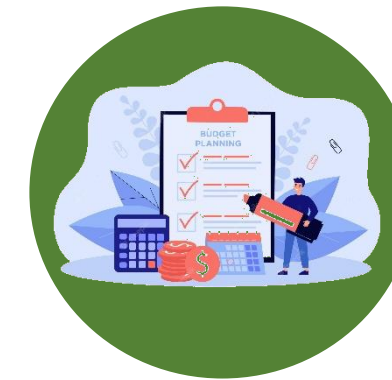
1

Kepatuhan pemda dalam penggunaan dan verifikasi data Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrem



2

Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan



3

Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2023 terkait kemiskinan ekstrem

Data berasal dari Kemendagri, KemenkoPMK, BKKBN, TNP2K, dan Kemenkeu

3) Kinerja Indikator Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri

- ☐ Pemenuhan mandatori Rencana Umum Pengadaan PDN & UMK minimal 40% belanja pengadaan (Belanja Barang jasa dan modal) sesuai pasal 81 PP No. 7 Tahun 2021;
- ☐ Jika daerah memenuhi syarat diatas, Nilai kinerja didasarkan pada formula:

$$\text{Kinerja Penggunaan PDN} = 0,8 \times \frac{\text{Realisasi Transaksi RUP Penyedia PDN dan UMK}}{\text{Anggaran Belanja Barjas dan Modal}} + 0,2 \times \frac{\text{Realisasi Transaksi E-Purchasing PDN dan UMK}}{\text{Anggaran Belanja Barjas dan Modal}}$$

- ☐ Sumber Data Berasal dari LKPP dan Kemenkeu
- ☐ Data Januari sd Juni Tahun 2024

4) Kinerja Indikator Kinerja Percepatan Belanja Daerah

- ☐ Ditujukan agar pemda segera dapat merealisasikan belanja daerah lebih awal dan tidak menumpuk di akhir tahun.
- ☐ Didasarkan pada Data realisasi belanja daerah s/d Juni 2024 dibanding dengan data anggaran daerah;

$$\text{Nilai rasio realisasi/anggaran} = \frac{30\% \times \text{Realisasi Belanja Pegawai} + 70\% \text{ Realisasi Belanja Non Pegawai}}{\text{Total Anggaran Belanja}}$$

- ☐ Data Berasal dari Kemenkeu
- ☐ Data Januari sd Juni Tahun 2024

RAPOR KINERJA INSENTIF FISKAL

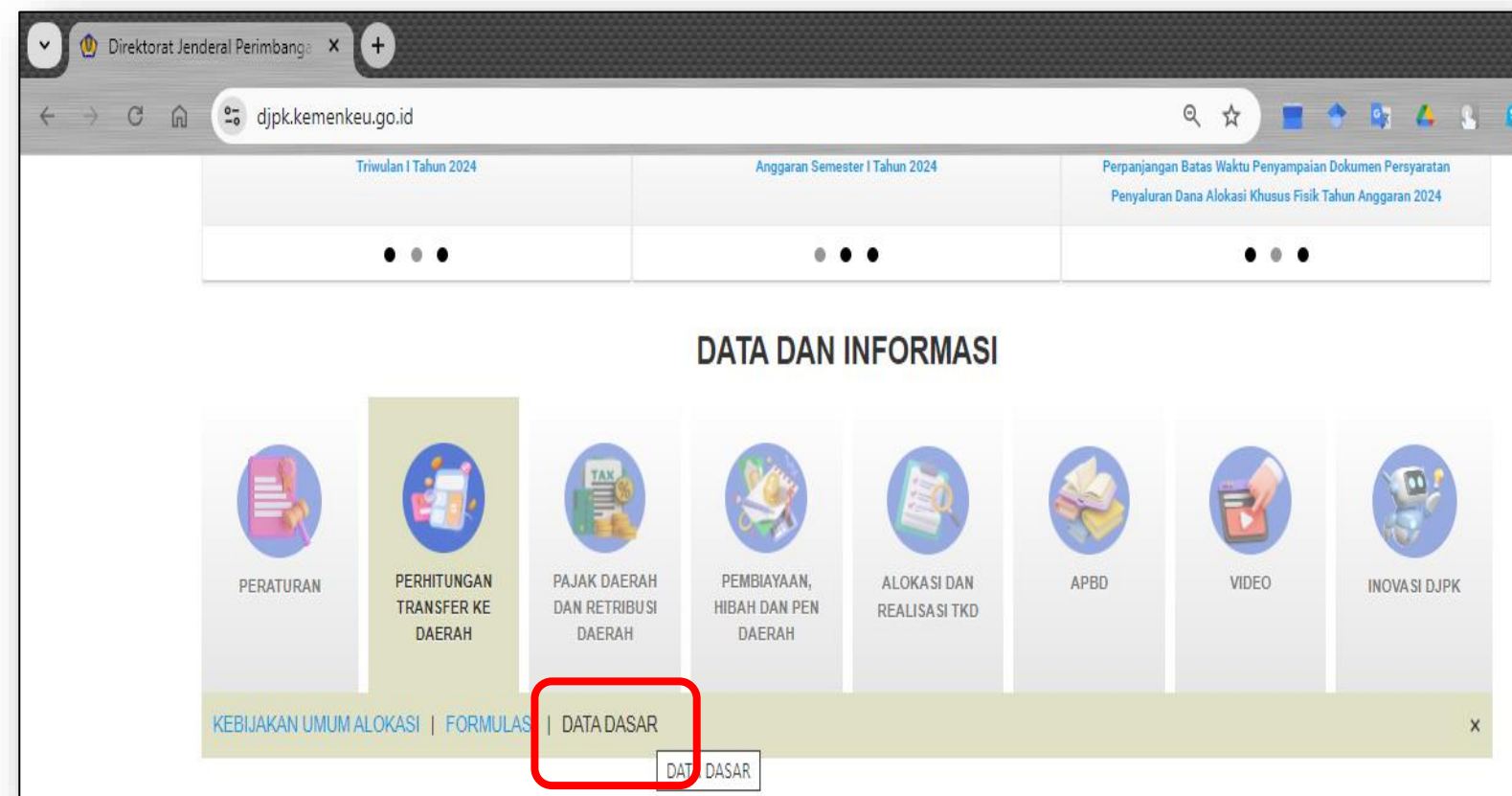


DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



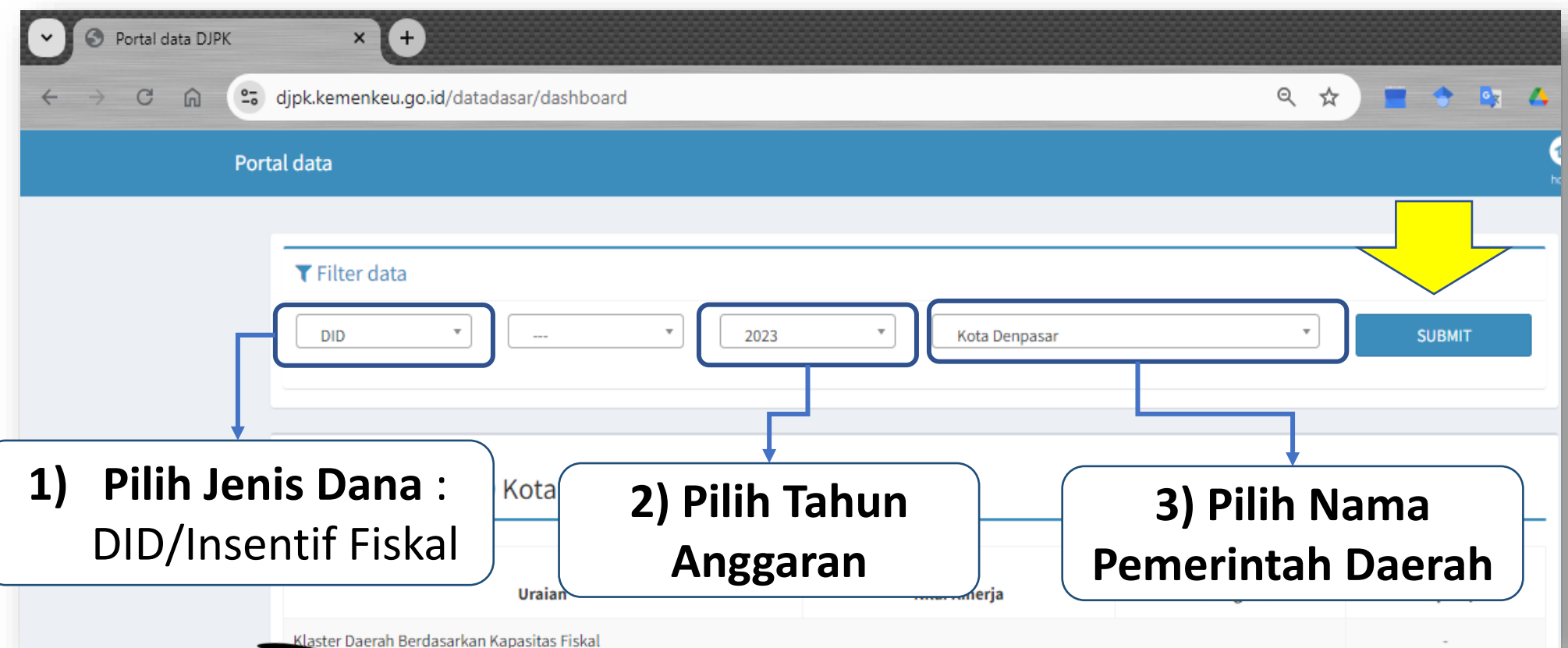
“Pemda dapat memperoleh informasi terkait hasil penilaian kinerja daerah melalui Rapor Kinerja Insentif Fiskal”

1) AKSES RAPOR KINERJA PADA WEBSITE DJPK



Rapor daerah dapat diakses melalui website DJPK pada tautan <https://djp.kemenkeu.go.id/datadasar/>

2) INPUT JENIS DANA, TAHUN ANGGARAN, DAN NAMA PEMDA



“IF diperoleh berdasarkan kinerja Pemda, **bukan dari pengajuan permohonan dana**”



PENJELASAN RAPOR KINERJA: IF Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KOTA A

IF INFLASI PERIODE I TA 2024		
Indikator Penilaian	Nilai	Nilai bobot
Kepatuhan Pelaporan	68,1	6,8
Jumlah Upaya	21,9	6,6
Tingkat Inflasi	92,5	27,7
%belanja inflasi	49,58	14,88
Total Nilai Kinerja		56,01
Peringkat		9
Alokasi		Rp5,58 Miliar

Penjelasan

- 1) Total **Nilai Kinerja Daerah A** sebesar **56,01**, berasal dari penilaian indikator:
 - i. Kepatuhan Pelaporan : 68,1 (kepatuhan penyampaian laporan ke Kemendagri, Kemendag, dan TPIP).
 - ii. Jumlah Upaya : 21,9 (frekuensi dan kualitas atas Pelaksanaan 9 Upaya pengendalian Inflasi).
 - i. Tingkat Inflasi : 92,5 (Peringkat Indeks Harga Konsumen (150 daerah) atau Indeks Perkembangan Harga).
 - i. Persentase Belanja Inflasi : 49,58 (rasio Realisasi Belanja Inflasi terhadap Total Anggaran Belanja).
- 2) Total nilai kinerja Kota A berada di **Peringkat 9** (masuk ke dalam 10 peringkat daerah terbaik untuk Kota) dan memperoleh alokasi sebesar **Rp5,58 Miliar**.

Rekapitulasi Daerah Penerima IF Tahun Berjalan TA 2024

Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat (1)



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



- Daerah penerima per kategori 130 daerah, total penerima alokasi dari keempat kategori adalah sebanyak 322 daerah (terdapat daerah yg mendapat lebih dari 1 kategori). Di tahun 2023 terdapat 310 daerah penerima;

	2023	2024
1	174	178
2	89	99
3	40	36
4	7	9
	310	322

- Perbandingan dengan tahun sebelumnya

	Kemiskinan Ekstrem	Stunting	PDN & UMK	Percepatan belanja	TOTAL
Berbeda	66(50.8%)	81(62.3%)	57(43.8%)	62(47.7%)	90(28%)
Sama	64(49.2%)	49(37.7%)	73(56.2%)	68(52.3%)	232(72%)
Total	130	130	130	130	322

- Di tahun 2024 terdapat 9 daerah yang mendapat alokasi dari 4 kategory kelompok kesmas sedangkan di tahun 2023 terdapat 7 daerah,dimana terdapat satu daerah yang sama;
- Alokasi terbesar adalah Rp25,99 miliar dan alokasi terendah adalah Rp5,27 miliar.
- Terdapat 90 daerah (28% daerah penerima) yang di tahun 2023 tidak mendapat alokasi dan di 2024 mendapat alokasi

Rekapitulasi Daerah Penerima IF Tahun Berjalan TA 2024

Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat (2)



“Daerah yang mendapat alokasi dari 4 kategori”

No	2023		2024	
1	Kab. Garut	Rp25.4 m	Kab. Garut	Rp26.0 m
2	Kab. Ciamis	Rp25.2 m	Kab. Mojokerto	Rp25.7 m
3	Kab. Serang	Rp24.5 m	Kota Denpasar	Rp24.8 m
4	Kab. Jepara	Rp24.5 m	Kota Yogyakarta	Rp24.0 m
5	Kab. Musi Banyuasin	Rp23.9 m	Kab. Lombok Tengah	Rp23.7 m
6	Kab. Grobogan	Rp23.4 m	Kota Tangerang Selatan	Rp23.7 m
7	Kab. Sragen	Rp23.0 m	Kab. Banjar	Rp23.6 m
8			Kab. Lamongan	Rp23.3 m
9			Kab. Brebes	Rp22.9 m

Distribusi Alokasi IF Tahun Berjalan TA 2024

Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat



Prov	Rp miliar	Jml Daerah
Aceh	188.4	19
Sumut	160.7	19
Sumbar	16.7	3
Babel	5.7	1
Riau	66.0	8
Kepri	40.8	5
Jambi	72.7	9
Sumsel	154.8	14
Bengkulu	72.0	7
	853.8	95
	(27.5%)	(29.5%)

Prov	Rp miliar	Jml Daerah
Kalbar	64.6	9
Kalteng	46.2	7
Kalsel	150.7	13
Kaltim	48.7	8
Kaltara	30.3	4
	340.4	41
	(11%)	(12.7%)

Prov	Rp miliar	Jml Daerah
Sulut	70.1	8
Sulteng	81.4	10
Sulsel	76.3	10
Sultra	76.0	10
Sulbar	6.2	1
Gorontalo	11.3	2
	321.2	41
	(10.4%)	(12.7%)

Prov	Rp miliar	Jml Daerah
Maluku	18.0	2
Malut	35.3	4
Papua	5.7	1
Papua Peg	18.7	2
Papua Selatan	11.8	1
Papua Tengah	23.7	4
Papua Barat	0.0	0
Papua Barat Daya	5.6	1
	118.8	15
	(3.8%)	(4.7%)

Prov	Rp miliar	Jml Daerah
Banten	121.5	8
DKI Jakarta	11.7	1
Jabar	249.1	22
Jateng	325.2	30
DIY	93.1	6
Jatim	357.3	31
	1.158	98
	(37.4%)	(30.4%)

Prov	Rp miliar	Jml Daerah
Bali	134.0	10
NTB	82.2	9
NTT	91.4	13
	307.7	32
	(9.9%)	(9.9%)

“Secara nominal dan jumlah daerah, alokasi IF Tahun Berjalan Kesma tersebar di seluruh Pulau”

KINERJA IF KTB TA 2024 – Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat

Kab. Garut

Kategori	Nilai Kinerja	Peringkat	Alokasi
1. Percepatan Belanja Daerah	23,41	27	Rp6,05
a. % Belanja Pegawai (30%)	22,75		
b. % Belanja Non Pegawai (70%)	23,7		
2. Kemiskinan Ekstrem	91,25	1	Rp7,30
a. Kinerja Kelembagaan (25%)	100		
b. Kepatuhan penggunaan dan verifikasi data P3KE (25%)	65		
c. Realisasi Belanja Kemiskinan 50%)	100		
3. Penurunan Stunting	73,53	5	Rp6,85
a. Input (15%)	15,00		
b. Proses (45%)	24,95		
c. Output (40%)	33,58		
4. Produk Dalam Negeri	0,23	58	Rp5,80
Syarat: Min. 40% RUP PDN & UMK	71,58		
a. Realisasi RUP/Belanja Barjas Modal (80%)	0,22		
b. Realisasi E-purchasing / Belanja Barjas Modal (20%)	0,01		
Total Alokasi			Rp25,9



- ❖ *Kab. Garut memperoleh alokasi tertinggi dalam IF KTB TA 2024 Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat dengan total alokasi sebesar Rp25,9 Miliar; dan*
- ❖ *Konsisten berkinerja baik dalam 4 kategori IF KTB Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat TA 2023 dan TA 2024.*

- 1) Hasil rapor kinerja menunjukkan Kab. Garut memperoleh alokasi dari kategori:**
- a. Percepatan Belanja Daerah : peringkat 27
 - b. Kemiskinan Ekstrem : peringkat 1
 - c. Penurunan Stunting : peringkat 5
 - d. Produk Dalam Negeri : peringkat 58
- 2) Seluruh peringkat dalam 4 kategori masuk ke dalam 99 kabupaten terbaik, sehingga memperoleh alokasi dari 4 kategori IF KTB Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat dengan total alokasi sebesar *Rp25,9 Miliar*.**

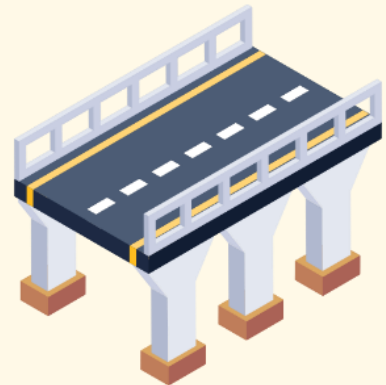
Penggunaan IF Kinerja Tahun Berjalan



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



“PMK 43/2024 Pasal 31 : Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan **digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah yang dapat meliputi:**”



Dukungan Infrastruktur
Pelayanan Publik



Peningkatan
Perekonomian



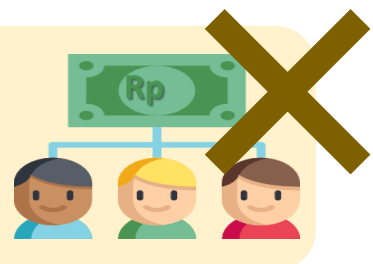
Pelayanan
Kesehatan



Pelayanan
Pendidikan

Tidak Dapat Untuk Mendanai:

Gaji, Tambahan
Penghasilan, dan
Honorarium



Perjalanan
Dinas



Daftar kegiatan pada
lampiran PMK bukan arah
penggunaan IF



Penyaluran & Pelaporan IF Kinerja Tahun Berjalan TA 2024



IF Kinerja Pengendalian Inflasi

Tahap I

50%

Paling Cepat : Mei (Periode 1), Juli (Periode 2), dan Oktober (Periode 3)
Tanpa syarat salur

Tahap II

50%

Persyaratan:

- Rencana Penggunaan IF Kinerja Inflasi TA 2024;
- Laporan Realisasi Penyerapan dana Tahap I min 30% (Periode 1), Min 20% (Periode 2);
- Laporan Realisasi Penyerapan IF TA 2023 (bagi daerah yg mendapatkan alokasi IF TA 2023)

Syarat salur disampaikan max. 29 November 2024

IF Kinerja Kesejahteraan Masyarakat

Tahap I

50%

Paling Cepat : Agustus 2024 (Tanpa syarat salur)

Tahap II

50%

Persyaratan:

- Rencana Penggunaan IF Kinerja Kesmas TA 2024;
- Laporan Realisasi Penyerapan dana Tahap I dengan serapan minimal 20%;
- Laporan Realisasi Penyerapan IF TA 2023 (bagi daerah yg mendapatkan alokasi IF TA 2023).

Syarat salur disampaikan max. 29 November 2024

“Aplikasi pelaporan rencana anggaran dan realisasi Insentif Fiskal”



<http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/did/>

DANA INSENTIF FISKAL dalam NOTA KEUANGAN & RAPBN TA 2025



Pada RAPBN TA 2025, alokasi Dana Insentif Fiskal direncanakan sebesar Rp6 triliun. dengan **arah kebijakan tahun 2025** untuk:

- Dialokasikan berdasarkan kinerja tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan;
- Indikator kinerja tahun sebelumnya: 1) pengelolaan keuangan daerah, 2) pelayanan umum pemerintahan, dan 3) pelayanan dasar;
- Indikator kinerja tahun berjalan: mendukung pencapaian target prioritas nasional dalam penghitungan;
- Mendorong peningkatan kemandirian daerah, antara lain melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain; dan
- Keberpihakan kepada daerah tertinggal.

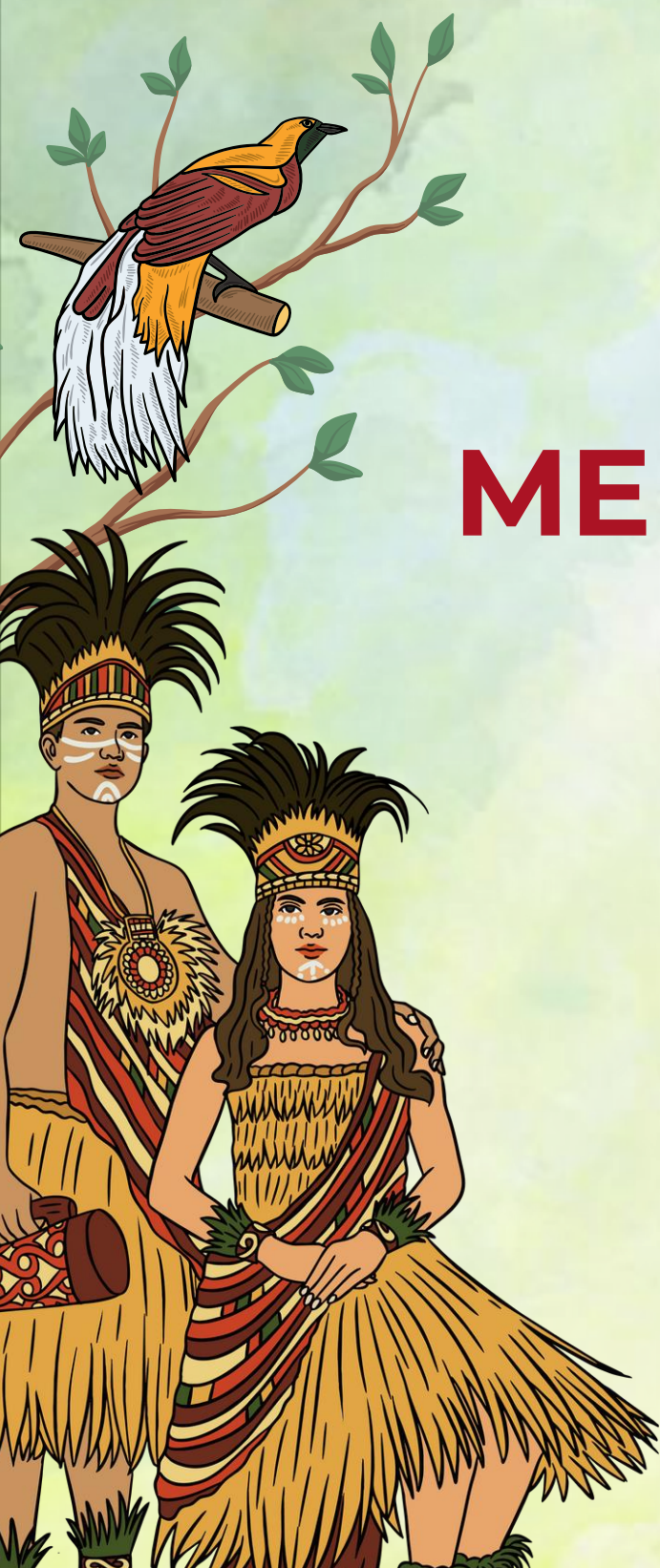
MARI DUKUNG!

**DIREKTORAT DANA DESA, INSENTIF,
OTONOMI KHUSUS DAN
KEISTIMEWAAN**

**MEWUJUDKAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI**

DDIOKK *Terbaik*

TERTIB, EFISIEN, RELIGIUS, BERANI, ADAPTIF, INTEGRITAS, KOLABORATIF





DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



TERIMA KASIH